

ETIKA KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA DENGAN MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MANSAMAT B KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

*Yulinar Saleh¹

Adrian Kede²

Article Info

Article history:

Received June 1st, 2023

Accepted June 10th, 2023

Published June 14th, 2023

Keyword:

Communication patterns, work performance, officer

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di desa mansamat B kecamatan tinangkung selatan kabupaten banggai kepulauan, Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui pola etika komunikasi yang dikedepankan Pemerintah Desa Mansamat B dengan masyarakat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Penulis menggunakan penelitian Kuantitatif yaitu Teknik Pengamatan (observasi), Tehnik Kuesioner dan Dokumentasi, Penelitian ini menggunakan skala Likert yang oleh Sugiono disebutkan sebagai metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi individu atau kelompok tentang fenomena. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, Data Primer yaitu data yang diperoleh dari dua sumber yaitu Observasi dan kuesioner yang dilakukan terhadap informan, responden yang dianggap dapat memberikan bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi ditentukan berdasarkan kegunaan dan saling berkaitan dengan masalah yang akan diteliti misal dokumen yang di dapat dari kantor desa mansamat B. Adapun sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian tersebut, informan penelitian adalah pemerintah dan masyarakat desa mansamat B yang berjumlah 89 orang.

This research was conducted in Mansamat B Village, Tinangkung Selatan District, Banggai Islands Regency. The purpose of this research was to be able to find out the pattern of communication ethics put forward by the Mansamat B Village government with the community in preparing the village government work plan (RKPDDes). The author uses quantitative research namely observation, questionnaire, and documentation. This study uses a likert scale which Sugiono mentions as a measurement method used to measure attitudes, opinions, and individual or group perceptions of phenomena. Sources of data in this study are primary data and secondary data, primary data, namely data obtained from two sources, namely observation and questionnaires conducted informants, respondents who are considered to be able to provide the materials and information needed in this study and secondary data, namely data obtained from institutions or agencies is determined based on use and interrelatedness with the problem to be studied, for example documents obtained from the Mansamat B Village office. As for the data sources used as a basis to support the research, the research informants were the government and the Mansamat B village community, totaling 89 people.

Copyright © 2023 SOCIETO COMMUNICATION JOURNAL. All rights reserved.

*Corresponding Author:

Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Muhammadiyah Luwuk

JL. KH. Ahmad Dahlan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk, Kabupaten Banggai, SULTENG 94711. Email: jurnalkomunikasiuml@gmail.com

Pendahuluan

Etika Komunikasi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkomunikasi manusia dapat saling berinteraksi satu sama lain baik di rumah bersama keluarga, di luar rumah, dan dimana saja manusia berada. Hal seperti ini, masalah Etika komunikasi selalu muncul di berbagai aspek seperti dalam bidang pemerintahan. Pemerintahan dapat berjalan dengan baik jika etika komunikasi di dalamnya berlangsung dengan baik pula, jika etika komunikasi berlangsung secara tidak baik maka strategi pemerintahan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan aparat pemerintahan desa.

Melihat kondisi saat ini, masalah etika komunikasi selalu muncul di berbagai aspek seperti dalam bidang pemerintahan. Pemerintahan dapat berjalan dengan baik jika komunikasi berlangsung dengan baik begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya, untuk menjalankan strategi komunikasi dalam pemerintahan diperlukan etika komunikasi yang baik untuk merencanakan suatu strategi yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

Langkah pemerintahan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera adalah diantaranya dengan melaksanakan pembangunan. Pembangunan selalu dipahami sebagai satu upaya atau langkah untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat, dalam rangka memperbaiki kondisi kehidupan untuk menjadi lebih baik tentunya dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama menggali berbagai persoalan. Partisipasi merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan proses belajar masyarakat; menggerakkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggung jawab menghapus perasaan terasing sebagai masyarakat serta menimbulkan dukungan dan penerimaan pemerintah. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu, pemerintah desa harus lebih banyak mendekati masyarakat, lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, dan yang lebih penting adalah lebih banyak menurunkan bantuan

Pemerintah desa seharusnya mempunyai peran yang sangat penting terhadap akselerasi (pelaksanaan implementasi) dari pada proses pembangunan. Dapat dikatakan demikian karena peran pemerintah di desa yang salah satu fungsinya ialah sebagai pemotivasi dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari pada proses pembangunan yang ada di desa lewat

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) atau kebijakan-kebijakan yang di implementasikan atau yang dilaksanakan dalam jangka satu tahun.

Penyebab kurangnya partisipasi dari masyarakat diakibatkan karena Pemerintah terkesan arogan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut program pembangunan dan pemberdayaan yang tidak melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi karena setiap keputusan yang di ambil oleh pemeruntah desa sudah di sapakati terlebih dahulu di internal pemerintah sehingga hasil rapat yang di laksanakan BPD hanya terkesan formalitas saja jadi kesepakatan yang di ambil tidak mewakili aspirasi masyarakat, Pada akhirnya sikap masyarakat Mansamat B yang tidak mau tahu akan keberadaan atau ketidak inginan untuk ikut ambil bagian dalam berpartisipasi (*apatis*), ini yang memicu kurangnya partisipasi masyarakat yang ada di desa masamat B itu sendiri. Sikap apatisme dari masyarakat itu muncul dikarenakan adanya masalah atau problem internal pemerintah desa yang etika komunikasi pemerintah yang desa tertutup dalam mensosialisasikan program rencana kerja pemerintah (RKPDDes) yang sepatutnya basisnya kebijakan diambil harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang mendesak bukanlah kebutuhan kelompok.

Jadi Etika pemerintah desa terlebih khusus pemerintah Desa Mansamat B akan sangat berpengaruh pada proses pembangunan desa. Suatu etika komunikasi yang baik berguna untuk mempengaruhi atau memicu minat masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan, sehingga pembangunan yang ada di desa berjalan sesuai dengan harapan bersama, demi terciptanya rasa aman dan damai didesa.

Pemerintah desa Mansamat B harus punya etika komunikasi yang aktual yang mampu memberikan pengaruh terhadap masyarakat, sehingga bisa mempengaruhi minat masyarakat terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) atau keterpanggilan jiwa masyarakat dalam berpartisipasi itu muncul. Pemerintah Desa Mansamat B sudah sepatasnya menyiapkan Etika komunikasi yang mampu mempengaruhi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Di Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Waktu penelitian yang dibutuhkan Selama Bulan sejak pelaksanaan Observasi, pengajuan judul sampai proses kegiatan penyelesaian penelitian yaitu bulan sampai 2021.

Metode Pengumpulan Data

Saleh Yuniar, et. al, Etika komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa 51
mansamat B kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang mempunyai kuantitas dan kriteria tertentu
Kualitatif¹ meliputi:

1. Pengamatan (*observasi*): melakukan pengamatan langsung terhadap etika komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam menyusun rencana kerja pemerintah di desa mansamat B Kecamatan tiangkung selatan kabupaten banggai kepulauan.
2. Kuesioner: pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan/ Pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden yang bersifat pribadi berkenaan dengan hal-hal yang dia ketahui.² Angket digunakan untuk memperoleh data yang menyangkut etika komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam menyusun rencana kerja pemerintah di desa mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Dokumentasi: kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara membuat catatan dan mendokumentasikan berbagai informasi data dari informan yang tersedia dari berbagai lembaga yang berkaitan dengan keperluan penelitian.

Populasi

Sugiono berpendapat populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari Subjek / Objek

kemudian dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.³ Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan Masyarakat Desa Mansamat B dan pemerintah desa. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat dan aparat pemerintah Desa Mansamat B

Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁴ Jumlah sampel diambil menggunakan rumus Slovin dan Umar mengingat besaran sampel tak diketahui jumlahnya. Rumus Slovin yang digunakan untuk menentukan sampel yaitu:⁵

$$n = \frac{N}{N.(d^2) + 1}$$

n = ukuran sampel yang dibutuhkan

N = ukuran Populasi

d = ukuran tingkat kesalahan yaitu 10% atau 0,1

Ukuran populasi diambil dari keseluruhan jumlah masyarakat dan aparat Pemerintah Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan yang seluruhnya berjumlah 740 jiwa sehingga kisaran jumlah sampel yang digunakan adalah:

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

$$n = \frac{740}{(740).(0.10)^2 + 1}$$

¹ Basrowi dan Suwandi (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

² Arikunto, Suharsimi. 2012. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Jakarta: Rhineka Cipta

³ Sugiono, 2011. *Metodologi Administrasi*. Bandung: Alfabeda. Hal 118-127

⁴ Suharsimi, Arikunto. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

⁵ Umar, Husein. 2012. *Metode Riset Komunikasi*.

$$n = \frac{740}{(740) \cdot 0,01 + 1}$$

$$n = \frac{740}{37 \times \frac{1}{5} + 1}$$

$$n = \frac{740}{\frac{37}{5} + 1}$$

$$n = \frac{740}{\frac{42}{5}}$$

$$n = \frac{1850}{21}$$

n = 88,095 dibulatkan menjadi 89 sampel responden

Hasil Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel berupa ‘Etika Komunikasi Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Mansamat B’ dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk mengetahui ukuran/besar data kuantitatif yang dihasilkan. Oleh peneliti kemudian data kuantitatif tersebut dinarasikan implisit secara deskriptif menurut hasil tabulasi data kuesioner yang berhasil dihimpun dari para responden.

1. Data Kuantitatif Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil rekapitulasi tabulasi data kuesioner dengan menggunakan skala likert, hasil analisis data deskriptif statistik untuk jumlah responden sebanyak 89 diketahui nilai rerata (mean) yang dihasilkan adalah 68,94, nilai tengah (median) sebesar 70, nilai yang paling banyak muncul (modus) yaitu 73, standard deviasi sebesar 8,44 dengan total jumlah keseluruhan sebesar 6136. Adapun nilai terendah (minimal) yaitu 47 dan nilai tertinggi

(maksimal) adalah 93 sehingga diketahui *range* (jarak) atau selisih antara nilai tertinggi dan terendahnya yaitu 46. Gambaran data kuantitatif deskriptif secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Data Deskriptif Statistik Etika Komunikasi Publik Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Mansamat B Terkait Penyusunan RKPDes

Statistics

Etika_Komunikasi_Pemdes
_Masyarakat_Mansamat_B

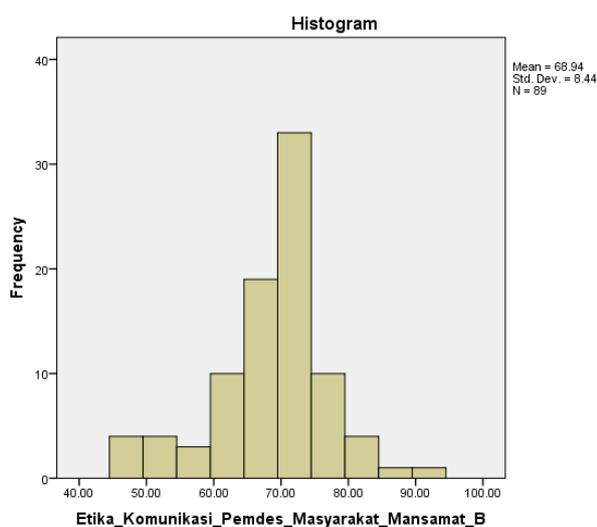
N	Valid	89
	Missing	0
Mean		68.9438
Median		70.0000
Mode		73.00
Std. Deviation		8.44011
Range		46.00
Minimum		47.00
Maximum		93.00
Sum		6136.00

Tabel 4.6 Sebaran Data Rentang Nilai Hasil Kuesioner Etika Komunikasi Publik Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Mansamat B Terkait Penyusunan RKPDes

Rentang Nilai	Frekuensi	Persentase
01 – 20	0	0

21 – 40	0	0
41 – 60	11	12,36
61 – 80	73	82,02
81 – 100	5	5,62
Total	89	100

Berdasarkan hasil tabulasi data sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.6 di atas, diketahui tak ada responden yang mendapatkan nilai di rentang 01-20 dan 21-40. Adapun responden yang mendapatkan nilai di rentang 41-60 terdapat sebanyak 11 responden atau 12,36% dari seluruh responden yang diteliti. Kisaran rentang nilai terbanyak dan paling dominan terdapat pada responden yang memiliki rentang nilai di kisaran 61-80 dengan jumlah responden sebanyak 73 orang atau 82,02%. Sementara responden yang memiliki nilai rentang tertinggi antara 81-100 hanya terdapat sebanyak 5 responden saja atau 5,62%nya. Infografis sebaran data rentang nilai di atas ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 4.1. Infografis Histogram Distribusi Data Nilai Responden

Data di atas menunjukkan bahwa secara rerata etika komunikasi publik yang terjalin antara aparat pemerintah desa dengan masyarakat desa terkait dengan program perencanaan penyusunan RKPDes yang berlangsung di Desa Mansamat B dapat dikategorikan ‘Memadai/Baik’ lantaran perolehan nilai rerata (mean) yang dihasilkan dari keseluruhan nilai responden adalah 68,9438 atau sebesar 68,94 yang berada pada rentang rerata nilai antara 61-80. Ini berarti upaya komunikasi publik yang dilakukan aparat pemerintah desa dengan masyarakat desa Mansamat B terkait program perencanaan penyusunan RKPDes dalam Musrembang yang telah diimplementasikan selama ini ternyata sudah berjalan dengan baik (memadai) sebagaimana mestinya sehingga hanya dibutuhkan sedikit pembenahan saja yang masih kurang.

Tabel 4.7 Hasil Interpretasi Kategori Nilai Responden

Rerata Nilai (Mean)	Kategori	Keterangan
01 - 20	Sangat Kurang Memadai	perlu pembenahan/perbaikan menyeluruh
21 - 40	Kurang Memadai	perlu pembenahan secara maksimal
41 - 60	Cukup Memadai	perlu reevaluasi sumber kelemahan

61 - 80	Memadai (Baik)	hanya perlu pembenahan yang masih kurang
81 - 100	Sangat Memadai (Sangat Baik)	perlu terus dipertahankan

3.	Ragu-Ragu	3	96	288	23,51
4.	Tidak Setuju	2	22	44	3,59
5.	Sangat Tidak Setuju	1	24	24	1,96
Jumlah			356	1225	100
Prosentase Jawaban			1225:1780 x 100 = 68,82%		
Kategori/Kriteria			Memadai (Baik)		

Analisis Data

Penelusuran data hasil penelitian mengenai etika komunikasi publik antara aparat pemerintah desa dengan masyarakat desa Mansamat B dalam kaitan program perencanaan penyusunan RKPDes dilakukan melalui kelima aspek indikator berikut:

a. *Respect* (penghargaan atas hak masyarakat desa)

Respect dalam tataran komunikasi publik berarti penghargaan atas hak masyarakat. Bentuk *respect* akan etika komunikasi publik yang diterapkan aparat pemerintah desa Mansamat B pada masyarakat terkait penyusunan RKPDes di antaranya dilakukan dengan langkah: 1). Mengakomodasi semua kepentingan masyarakat desa, 2). Mewujudkan keinginan masyarakat banyak secara munafakat, 3). Aparat desa mau mendengar/menampung berbagai masukan dari masyarakat, dan 4). Proses penyusunan RKPDes dilakukan secara kolektif kolegial berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun distribusi datanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8. Distribusi Data Indikator *Respect*

No.	Alternatif Jawaban	Bobot (b)	Frekuensi (f)	fxb	%
1.	Sangat Setuju	5	13	65	5,31
2.	Setuju	4	201	804	65,63

b. *Empathy* (mendengarkan masalah)

Empati merupakan kemampuan untuk mendengarkan dan mengerti akan masalah yang terjadi. Bentuk empati dalam etika komunikasi publik yang diaplikasikan aparat Pemerintah Desa Mansamat B terkait penyusunan RKPDes di antaranya dilakukan dengan tahapan: 1). Selalu terbuka dalam menerima segala bentuk masukan, saran dan kritik dari masyarakat, 2). Pengalokasian anggaran secara tepat guna dan merata sesuai pedoman yang berlaku, 3). Mensinergikan perencanaan RKPDes sejalan dengan program agenda prioritas pemerintah daerah, 4). Memperhatikan aspek pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan

Tabel 4.9. Distribusi Data Indikator *Empathy*

No.	Alternatif Jawaban	Bobot (b)	Frekuensi (f)	fxb	%
1.	Sangat Setuju	5	43	215	17,47
2.	Setuju	4	131	524	42,57
3.	Ragu-	3	136	408	33,1

	Ragu				4
4.	Tidak Setuju	2	38	76	6,17
5.	Sangat Tidak Setuju	1	8	8	0,65
	Jumlah		356	123 1	100
	Prosentase Jawaban		1231:1780 x 100 = 69,16%		
	Kategori/Kriteria		Memadai (Baik)		

Berdasar hasil analisis data yang ditunjukkan pada tabel 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa hasil pengukuran melalui empat item pernyataan untuk indikator *empathy* dari 89 responden penelitian terdapat 43 atau (17,47%) jawaban yang menyatakan Sangat Setuju, 131 jawaban atau (42,57%) yang menyatakan Setuju, 136 jawaban atau (33,14%) yang menyatakan Ragu-Ragu, 38 jawaban (6,17%) yang menyatakan Tidak Setuju, dan hanya terdapat 8 jawaban (0,65%) saja yang menyatakan Sangat Tidak Setuju.

Berdasarkan atas hal itu, maka hasil analisis data secara keseluruhan untuk indikator *empathy* yang terdiri dari empat item penilaian didapat nilai prosentase jawaban agregat sebesar 69,16% yang mana pada kriteria/kategori etika komunikasi publik untuk indikator *empathy* sendiri dinyatakan ‘Sudah Memadai’

c. *Audible* (ketersampaian informasi)

Audible dalam ranah komunikasi berarti pesan/informasi yang disampaikan memang benar-benar sampai pada si penerima pesan. Ketersampaian informasi dalam aspek komunikasi publik yang diaplikasikan aparat

Pemerintah Desa Mansamat B terkait penyusunan RKPDes di antaranya diwujudkan dengan jalan: 1). Publikasi informasi melalui bauran kanal media daring dan luring secara berkeseimbangan, 2). Kesesuaian detail informasi sesuai ketentuan pedoman yang berlaku (UU Desa), 3). Pencantuman *timeline* jadwal alokasi waktu penyusunan, dan 4). Keterjangkauan akses informasi bagi semua lapisan masyarakat.

Tabel 4.10. Distribusi Data Indikator *Audible*

No	Alternatif Jawaban	Bobot (b)	Frekuensi (f)	fxb	%
1.	Sangat Setuju	5	19	95	8,23
2.	Setuju	4	166	664	57,48
3.	Ragu-Ragu	3	89	267	23,12
4.	Tidak Setuju	2	47	94	8,14
5.	Sangat Tidak Setuju	1	35	35	3,03
	Jumlah		356	1155	100
	Prosentase Jawaban		1155:1780 x 100 = 64,89%		
	Kategori/Kriteria		Cukup Memadai		

Berpijak dari hasil analisis data yang ditunjukkan pada tabel 4.10 di atas, terlihat bahwa dari hasil pengukuran melalui empat item pernyataan untuk indikator *audible* yang berasal dari 89 responden penelitian terdapat 19 atau (8,23%) jawaban yang menyatakan Sangat Setuju, 166 jawaban atau (57,48%) yang menyatakan Setuju, 89 jawaban atau (23,12%) yang menyatakan Ragu-Ragu, 47 jawaban

(8,14%) yang menyatakan Tidak Setuju, dan hanya terdapat 35 jawaban (3,03%) saja yang menyatakan Sangat Tidak Setuju.

Berdasarkan atas hal itu, maka hasil analisis data secara keseluruhan untuk indikator *audible* yang terdiri dari empat item penilaian didapat nilai prosentase jawaban agregat sebesar 64,89% yang mana pada kriteria/kategori etika komunikasi publik untuk indikator *empathy* sendiri dinyatakan ‘Cukup Memadai’.

d. *Clarity* (informasi jelas dan dapat difahami/dimengerti)

Clarity secara proporsional dapat diartikan sebagai sikap keterbukaan akan adanya transparansi yang didukung dengan bentuk pertanggungjawaban. Bentuk manifestasi *clarity* dalam aspek komunikasi publik yang diimplementasikan aparat pemerintah desa terhadap masyarakat desa Mansamat B terkait penyusunan RKPDes di antaranya diwujudkan dengan: 1). Adanya sikap keterbukaan (transparansi) yang disertai dengan pertanggungjawaban penuh (akuntabel), 2). Ketepatan protokol (prosedural) tugas serta proses pelaksanaan yang sesuai dengan pedoman tata laksana yuridis formal yang berlaku, 3). Ketercapaian akan kualitas pencatatan administrasi dan penyelesaian pada tujuan program kerja, serta 4). Optimalisasi kualitas proses dan hasil perencanaan yang mumpuni.

Tabel 4.11. Distribusi Data Indikator *Clarity*

No	Alternati	Bobo	Frekuens	fxb	%
.	f	t (b)	i (f)		

	Jawaban				
1.	Sangat Setuju	5	26	130	10,12
2.	Setuju	4	206	824	64,12
3.	Ragu-Ragu	3	86	258	20,08
4.	Tidak Setuju	2	35	70	5,45
5.	Sangat Tidak Setuju	1	3	3	0,23
Jumlah			356	1285	100
Prosentase Jawaban		$1285:1780 \times 100 = 72,19\%$			
Kategori/Kriteria		Memadai (Baik)			

Mengacu pada hasil analisis data yang ditunjukkan dalam tabel 4.11 di atas, terlihat bahwa dari hasil pengukuran melalui empat item pernyataan untuk indikator *clarity* yang berasal dari 89 responden penelitian terdapat 26 atau (10,12%) jawaban yang menyatakan Sangat Setuju, 206 jawaban atau (64,12%) yang menyatakan Setuju, 86 jawaban atau (20,08%) yang menyatakan Ragu-Ragu, 35 jawaban (5,45%) yang menyatakan Tidak Setuju, dan hanya terdapat 3 jawaban (0,23%) saja yang menyatakan Sangat Tidak Setuju.

Berdasarkan atas hal itu, maka hasil analisis data secara keseluruhan untuk indikator *clarity* yang terdiri dari empat item penilaian didapat nilai prosentase jawaban agregat sebesar 72,19% yang mana pada kriteria/kategori etika komunikasi publik untuk indikator *clarity* sendiri dinyatakan ‘Sudah Memadai’.

e. *Humble* (tulus dan berdedikasi)

Humble pada kaitan komunikasi publik dapat

Saleh Yuniar, et. al, Etika komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa 57 dinyatakan sebagai suatu bentuk ketulusan akan sikap dedikasi yang diberikan. Perwujudan atas sikap *humble* dalam etika komunikasi publik yang dihadirkan aparat pemerintah desa terhadap masyarakat desa Mansamat B terkait dengan penyusunan RKPDes diaktualisasikan dalam bentuk: 1). Dialog/diskusi guna menentukan prioritas tingkat kebutuhan masyarakat desa, 2). Proses dialog/diskusi tidak menjadi domain sebagian pihak saja (*fairness*), 3). Menghargai tiap aspirasi yang masuk, serta 4). Lebih egaliter dan akomodatif dalam mengambil putusan strategis penting saat penyusunan RKPDes.

Tabel 4.12. Distribusi Data Indikator

Humble

No	Alternatif Jawaban	Bobot (b)	Frekuensi (f)	fxb	%
1.	Sangat Setuju	5	21	105	8,57
2.	Setuju	4	208	832	67,92
3.	Ragu-Ragu	3	72	216	17,63
4.	Tidak Setuju	2	17	34	2,78
5.	Sangat Tidak Setuju	1	38	38	3,10
Jumlah			356	1225	100
Prosentase Jawaban		1225:1780 x 100 = 68,82%			
Kategori/Kriteria		Memadai (Baik)			

Berangkat dari hasil analisis data yang ditunjukkan pada tabel 4.12 di atas, terlihat bahwa dari hasil pengukuran melalui empat item pernyataan untuk indikator *humble* yang berasal

dari 89 responden penelitian terdapat 21 atau (8,57%) jawaban yang menyatakan Sangat Setuju, 208 jawaban atau (67,92%) yang menyatakan Setuju, 72 jawaban atau (17,63%) yang menyatakan Ragu-Ragu, 17 jawaban (2,78%) yang menyatakan Tidak Setuju, dan hanya menyisakan 38 jawaban (3,10%) saja yang menyatakan Sangat Tidak Setuju.

Berdasarkan atas hal itu, maka hasil analisis data secara keseluruhan untuk indikator *humble* yang terdiri dari empat item penilaian didapat nilai prosentase jawaban agregat sebesar 68,82% yang mana pada kriteria/kategori etika komunikasi publik untuk indikator *humble* sendiri dinyatakan ‘Sudah Memadai’.

Resume hasil nilai prosentase agregat dari kelima indikator etika komunikasi publik yang diaplikasikan aparat pemerintah desa pada masyarakatnya terkait perencanaan penyusunan RKPDes desa Mansamat B diketahui nilai tertinggi yang diperoleh dari kelima indikator tersebut adalah indikator *clarity* dengan hasil nilai prosentase sebesar 72,19%. Nilai tertinggi kedua dimiliki oleh indikator *empathy* dengan hasil nilai prosentase agregat sebesar 69,16%. Nilai tertinggi ketiga didapat oleh dua indikator yakni *respect* dan *humble* yang sama-sama peroleh nilai prosentase agregat yang sama sebesar 68,82% di mana untuk kriteria/kategori keempat indikator tersebut seluruhnya tergolong masuk pada kategori ‘Sudah Memadai’. Adapun nilai terendah dari kelima indikator etika komunikasi publik diperoleh indikator *audible*

yang hanya peroleh nilai prosentase agregat sebesar 64,89% yang masuk dalam kriteria/kategori ‘Cukup Memadai’.

Tabel 4.13 Rekapitulasi Distribusi Data Indikator Etika Komunikasi Publik

Indikator	Prosentase Agregat	Kriteria/Kategori
<i>Respect</i>	68,82%	Sudah Memadai
<i>Empathy</i>	69,16%	Sudah Memadai
<i>Audible</i>	64,89%	Cukup Memadai
<i>Clarity</i>	72,19%	Sudah Memadai
<i>Humble</i>	68,82%	Sudah Memadai

Pembahasan

Instrumen untuk mengukur serta menilai tingkat efektifitas ketercapaian etika komunikasi publik aparat pemerintah desa pada masyarakat desa Mansamat B dalam kaitan penyusunan perencanaan RKPDes yang digunakan dalam penelitian ini dibangun berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh James W. Tankard. Jr. dalam teorinya yang meliputi: Respek (*Respect*), Empati (*Empathy*), Dapat Dimengerti (*Audible*), Kejelasan (*Clarity*), dan Rendah Hati (*Humble*).⁶

Mengacu pada hasil analisis data penilaian yang diperoleh untuk nilai prosentase agregat etika komunikasi publik yang dijalankan aparat pemerintah desa terhadap masyarakat desa terkait program penyusunan perencanaan RKPDes yang berlangsung di Desa Mansamat B secara umum dapat dikategorikan ‘Sudah

Memadai/Baik’ lantaran perolehan nilai rerata (mean) yang dihasilkan dari keseluruhan nilai responden adalah 68,9438 atau sebesar 68,94 yang berada pada rentang rerata nilai antara 61-80. Dengan begitu, peneliti berkesimpulan bahwa secara agregat, etika komunikasi publik yang dijalankan aparat pemerintah desa dengan masyarakat desa terkait penyusunan perencanaan RKPDes Mansamat B dalam Musrembang yang diimplementasikan selama ini memang sudah berjalan dengan baik (memadai) sesuai pedoman etiket komunikasi yang telah diatur dalam landasan yuridis formal UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menganut prinsip KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan).

Ditinjau dari aspek nilai prosentase kelima indikator yang ada, terlihat nilai tertinggi dari kelima indikator tersebut adalah indikator *clarity* dengan hasil nilai prosentase sebesar 72,19%. Nilai tertinggi kedua dimiliki oleh indikator *empathy* dengan hasil nilai prosentase agregat sebesar 69,16%. Nilai tertinggi ketiga didapat oleh dua indikator yakni *respect* dan *humble* yang sama-sama peroleh nilai prosentase agregat yang sama sebesar 68,82% di mana untuk kriteria/kategori keempat indikator tersebut seluruhnya tergolong masuk pada kategori ‘Sudah Memadai’. Adapun nilai terendah dari kelima indikator etika komunikasi publik diperoleh indikator *audible* yang hanya

⁶ Tankard Jr, J. W. (2001). The Empirical Approach to the Study of Media Framing in *Framing Public Life*. Routledge. (pp. 111-121).

Saleh Yuniar, et. al, Etika komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa 59
mansamat B kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan
peroleh nilai prosentase agregat sebesar mampu memberi kejelasan pelayanan secara
64,89% yang masuk dalam kriteria/kategori bertanggungjawab, memahami akan tuntutan
'Cukup Memadai'. perubahan, serta tidak semata-mata hanya
bertindak sesuai standar perilaku yang diatur
dalam prinsip-prinsip administrasi semata.

Aparat elitis di tingkat birokrat desa
dalam hal ini telah menerapkan etiket
komunikasi publik yang baik lagi memadai
pada masyarakat sipil (publik) selama
penyelenggaraan penyusunan perencanaan
RKPDes dalam kegiatan Musrembang
Mansamat B yang diadakan di desanya demi
menunjang tercapainya kolaborasi partisipasi
masyarakat secara komunal.

Bentuk manifestasi *clarity* dalam aspek
komunikasi publik yang diimplementasikan
aparap pemerintah desa terhadap masyarakat
desa Mansamat B terkait penyusunan RKPDes
di antaranya diwujudkan dengan: 1). Adanya
sikap keterbukaan (transparansi) yang disertai
dengan pertanggungjawaban penuh
(akuntabel), 2). Ketepatan protokol
(prosedural) tugas serta proses pelaksanaan
yang sesuai dengan pedoman tata laksana
yuridis formal yang berlaku, 3). Ketercapaian
akan kualitas pencatatan administrasi dan
penyelesaian pada tujuan program kerja, serta
4). Optimalisasi kualitas proses dan hasil
perencanaan yang mumpuni.

Hasil tersebut sangatlah berkesesuaian
dengan apa yang diutarakan oleh Erol dalam
Keban yang menyebut bahwa seorang
administrator dianggap mampu mengedepankan
standar etika komunikasi yang baik bilamana ia

Melihat akan perkembangan dan perubahan
dinamika kondisi masyarakat saat ini yang lebih
kritis, para aparat birokrat juga dituntut harus
mampu melayani secara lebih profesional,
efektif, efisien, sederhana, transparan, responsif
serta adaptif terhadap perkembangan maupun
perubahan zaman yang terjadi.⁷

Subarsono dalam kesempatan lain juga
menekankan bahwa konsep pelayanan publik
yang berkembang sekarang ini sudah
bertransformasi pada bentuk pembaharuan
yang lebih menekankan pada konsep model
birokrasi *new public service* yang lebih
mengarah pada persamaan hak di antara sipil
dan publik di mana kepentingan keduanya
haruslah dirumuskan melalui hasil dialog
bersama antar elemen berdasarkan preferensi
nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
Birokrasi yang dilakukan juga haruslah
responsif dilandasi dengan penuh rasa
tanggung jawab yang tinggi pada masyarakat
secara keseluruhan baik secara hukum maupun
nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang di
dalamnya.

⁷ Keban, F., & Erol, M. (2011). Effects of Strategy Instruction in Cooperative Learning Groups Concerning Undergraduate Physics Labworks. *Latin-American Journal of Physics Education*, 5(1).

Pelayanan publik model baru harus bersifat *non diskriminatif* yang menjamin adanya persamaan warga masyarakat tanpa membedakan asal-usul, ras, suku, agama, latar belakang pendidikan dan lainnya. Semua diperlakukan sama sesuai dengan hak-hak mereka sebagaimana syarat-syarat yang ada. Hubungan yang terjalin antara birokrat dengan sipil dan publik adalah hubungan impersonal sehingga terhindar dari sifat nepotisme dan primordialisme.⁸

Sementara itu, bentuk empati dalam etika komunikasi publik yang diaplikasikan aparat Pemerintah Desa Mansamat B terkait penyusunan RKPDes di antaranya dilakukan dengan tahapan: 1). Selalu terbuka dalam menerima segala bentuk masukan, saran dan kritik dari masyarakat, 2). Pengalokasian anggaran secara tepat guna dan merata sesuai pedoman yang berlaku, 3). Mensinergikan perencanaan RKPDes sejalan dengan program agenda prioritas pemerintah daerah, serta 4). Memperhatikan aspek pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan.

Tahapan kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang sedang berjalan di Desa Mansamat B sebagaimana data yang diperoleh peneliti di lapangan dilakukan melalui kegiatan yang meliputi: a). Penyusunan perencanaan

pembangunan desa melalui musyawarah desa, b). Pembentukan tim penyusun RKP Desa yang diinisiasi oleh pihak kepala desa, c). Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program kegiatan desa, d). Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, e). Penyusunan rancangan RKP Desa, f). Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang), g). Penetapan RKP Desa, h). Perubahan RKP Desa, dan i). Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Hasil temuan data di lapangan tersebut kurang lebih sama dengan apa yang tercantum dalam tata laksana pelaksanaan penyusunan RKPDes sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa* di mana penyusunan rancangan RKP Desa haruslah berpedoman pada: a). Hasil kesepakatan musyawarah desa; b). Pagu indikatif desa; c). Pendapatan asli desa; d). Penyelarasan dengan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota; e). Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota; f). Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM desa; g). Hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan h). Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.⁹

⁸ Subarsono, A. G. (2005). Bab 4. Pelayanan Publik yang Efisien, Responsif dan Non-Partisan. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, 140.

⁹ Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.

Sedangkan bentuk *respect* akan etika komunikasi publik yang diterapkan aparat pemerintah desa Mansamat B pada masyarakat terkait penyusunan RKPDes di antaranya dilakukan dengan langkah: 1). Mengakomodasi semua kepentingan masyarakat desa, 2). Mewujudkan keinginan masyarakat banyak secara munfakat, 3). Aparat desa mau mendengar/menampung berbagai masukan dari masyarakat, dan 4). Proses penyusunan RKPDes dilakukan secara kolektif kolegial berdasarkan kesepakatan bersama.

Pada kaitan langkah di atas, program penyusunan RKPDes yang berjalan di Desa Mansamat B juga mengupayakan tiga bentuk pendekatan komunikasi strategis dari para aparat desa terhadap masyarakatnya yang menekankan atas tercapainya fungsi: a. *Utilitarian Approach* (pendekatan atas asas manfaat), b). *Individual Rights Approach* (pendekatan atas hak masyarakat), dan c). *Justice Approach* (pendekatan kesamaan dalam kedudukan).

Dengan begitu, pemberdayaan etika komunikasi publik yang dikedepankan pemerintah desa dapat diupayakan pada bentuk: a). Penghormatan terhadap hak hidup manusia dan HAM lainnya, b). Kejujuran (honesty), c). Keadilan dan kepatutan, d). Kekuatan moralitas dan integritas (fortitude), e). Kesederhanaan dan pengendalian diri

(temperance), serta f). Kesesuaian dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya.

Sementara untuk perwujudan atas sikap *humble* dalam etika komunikasi publik yang dihadirkan aparat pemerintah desa terhadap masyarakat desa Mansamat B terkait dengan penyusunan RKPDes diaktualisasikan pada bentuk: 1). Dialog/diskusi guna menentukan prioritas tingkat kebutuhan masyarakat desa, 2). Proses dialog/diskusi tidak menjadi domain sebagian pihak saja (*fairness*), 3). Menghargai tiap aspirasi yang masuk, serta 4). Lebih egaliter dan akomodatif dalam mengambil putusan strategis penting saat penyusunan RKPDes.

Senama dengan Peters, *et.al* dalam Osborne yang pada pendapatnya juga menekankan akan pentingnya manajer/pemimpin untuk mendengarkan berbagai masukan dari pelanggan atau pengguna layanan yang dalam hal ini adalah masyarakat desa itu sendiri demi tercapainya kualitas layanan yang diraih. Proses komunikasi dialog hendaknya juga mengedepankan etika berkomunikasi yang tepat, jujur, tidak mengada-ada dan tidak berusaha menutupi ataupun melakukan *bargaining* (tawar-menawar) dalam perspektif negatif.¹⁰ Konsep *Citizen's Charter* (kontrak pelayanan) sebagai suatu pendekatan dalam pemberian layanan yang menempatkan pengguna layanan sebagai titik sentral dalam hal ini juga perlu diupayakan.

¹⁰ Osborne, D. (1993). *Reinventing Government*.

Adapun indikator *Audible* (ketersampaian informasi) dalam aspek komunikasi publik yang diaplikasikan aparat Pemerintah Desa Mansamat B terkait penyusunan RKPDes di antaranya diwujudkan dengan jalan: 1). Publikasi informasi melalui bauran kanal media daring dan luring secara berkeseimbangan, 2). Kesesuaian detail informasi sesuai ketentuan pedoman yang berlaku (UU Desa), 3). Pencantuman *timeline* jadwal alokasi waktu penyusunan, dan 4). Keterjangkauan akses informasi bagi semua lapisan masyarakat.

Suatu kinerja baik akan percuma saja bila tidak dibarengi dengan ketersediaan informasi ke masyarakat. Untuk itulah

perlunya kecakapan seorang komunikator dalam membangun narasi publik yang baik di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan seputar *audible* pada aspek etika komunikasi publik yang terjadi di dalam birokrasi pemerintah desa Mansamat B nyatanya masih menjadi titik lemah dari sekian indikator yang lain. Untuk itulah perlunya perbaikan lebih lanjut dalam sistem serta manajemen kerja dari aparat desa terkait sisi komunikasi publik yang dikedepankannya agar dapat mendukung ketercapaian program pelaksanaan RKPDes secara optimal. Beberapa hal terkait audibilitas yang masih butuh perbaikan ke depan di antaranya: a). Perlunya transformasi teknologi digital dalam

aplikasi Sistem Informasi Manajemen RKPDes yang saat ini masih mengandalkan publikasi secara fisik semata, b). Keterbatasan dana desa yang mengakibatkan belum maksimalnya proses operasional di lapangan, c). Ketepatan waktu dalam penyelesaian *timeline* tugas yang masih belum tepat sesuai jadwal, serta d). Partisipasi publik (masyarakat) masih belum optimal lantaran belum maksimalnya dukungan sosialisasi berkaitan Musrembang RKPDes ke masyarakat. Tak heran jika indikator *audible* dalam hal ini masih menjadi titik terlemah dari kelima indikator yang lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Tiga simpulan hasil penelitian yang didapat peneliti pada penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Data deskriptif untuk nilai rerata etika komunikasi publik yang dijalankan aparat pemerintah desa terhadap masyarakat desa terkait program penyusunan perencanaan RKPDes yang berlangsung di Desa Mansamat B dapat dikategorikan ‘Sudah Memadai/Baik’ lantaran perolehan nilai rerata (mean) yang dihasilkan dari keseluruhan nilai responden adalah 68,9438 atau sebesar 68,94 yang berada pada rentang rerata nilai antara 61-80. Dengan begitu peneliti berkesimpulan bahwa secara agregat etika komunikasi publik yang dijalankan aparat pemerintah desa terhadap masyarakatnya

Saleh Yuniar, et. al, Etika komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa 63
 mansamat B kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan
 terkait penyusunan perencanaan RKPDes Mansamat B terkait penyusunan RKPDes di
 Mansamat B dinyatakan sudah berjalan dengan
 baik atau ‘Sudah Memadai’ sebagaimana
 pedoman etiket komunikasi yang telah diatur
 dalam landasan yuridis formal UU Desa Nomor
 6 Tahun 2014 yang menganut prinsip
 KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan
 Pelayanan untuk Kesejahteraan) sehingga hanya
 dibutuhkan sedikit pembenahan saja yang masih
 kurang.

2. Mengacu pada hasil penelitian yang
 diperoleh pada penilaian kelima indikator etika
 komunikasi publik, terlihat indikator *clarity*
 merupakan indikator yang peroleh hasil nilai
 tertinggi dengan rerata skor 319,25 dan rerata
 nilai sebesar 3,587 yang masuk dalam kriteria
 ‘Sangat Memadai’. Indikator dengan nilai
 tertinggi kedua diperoleh *empathy* dengan hasil
 nilai rerata skor 312,75 dan rerata nilai sebesar
 3,514 yang juga masuk dalam kriteria ‘Sangat
 Memadai’. Nilai tertinggi ketiga didapat dua
 indikator sekaligus yakni *respect* dan *humble*
 yang sama-sama peroleh nilai rerata skor
 sebesar 306,25 dan rerata nilai sebesar 3,441
 dengan keduanya masuk dalam kriteria ‘Sudah
 Memadai’ serta nilai terendah dari kelima
 indikator etika komunikasi publik diperoleh
 indikator *audible* yang hanya peroleh nilai
 sebesar 289,50 dan rerata nilai sebesar 3,253
 yang masuk kriteria ‘Sudah Memadai’.

3. Bentuk manifestasi *clarity* dalam aspek
 komunikasi publik yang dikedepankan aparat
 pemerintah desa terhadap masyarakat desa
 Mansamat B di antaranya diwujudkan dengan: 1). Adanya sikap
 keterbukaan (transparansi) yang disertai dengan
 pertanggungjawaban penuh (akuntabel), 2).
 Ketepatan protokol (prosedural) tugas serta
 proses pelaksanaan yang sesuai dengan
 pedoman tata laksana yuridis formal yang
 berlaku, 3). Ketercapaian akan kualitas
 pencatatan administrasi dan penyelesaian pada
 tujuan program kerja, serta 4). Optimalisasi
 kualitas proses dan hasil perencanaan yang
 mumpuni. Sedangkan bentuk empati dalam
 etika komunikasi publik yang diaplikasikan
 aparat Pemerintah Desa Mansamat B terkait
 penyusunan RKPDes di antaranya dilakukan
 dengan tahapan: 1). Selalu terbuka dalam
 menerima segala bentuk masukan, saran dan
 kritik dari masyarakat, 2). Pengalokasian
 anggaran secara tepat guna dan merata sesuai
 pedoman yang berlaku, 3). Mensinergikan
 perencanaan RKPDes sejalan dengan program
 agenda prioritas pemerintah daerah, 4).
 Memperhatikan aspek pemenuhan kebutuhan
 dasar masyarakat miskin dan rentan. Adapun
 bentuk *respect* akan etika komunikasi publik
 yang diterapkan aparat pemerintah desa
 Mansamat B pada masyarakat terkait
 penyusunan RKPDes di antaranya dilakukan
 dengan langkah: 1). Mengakomodasi semua
 kepentingan masyarakat desa, 2). Mewujudkan
 keinginan masyarakat banyak secara munfakat,
 3). Aparat desa mau mendengar/menampung
 berbagai masukan dari masyarakat, dan 4).

Proses penyusunan RKPDes dilakukan secara kolektif kolegial berdasarkan kesepakatan bersama. Sementara perwujudan atas sikap *humble* dalam etika komunikasi publik yang dihadirkan aparat pemerintah desa terhadap masyarakat desa Mansamat B terkait dengan penyusunan RKPDes diaktualisasikan dalam bentuk: 1). Dialog/diskusi guna menentukan prioritas tingkat kebutuhan masyarakat desa, 2). Proses dialog/diskusi tidak menjadi domain sebagian pihak saja (*fairness*), 3). Menghargai tiap aspirasi yang masuk, serta 4). Lebih egaliter dan akomodatif dalam mengambil putusan strategis penting saat penyusunan RKPDes. Pada bentuk *audible* (ketersampaian informasi) dalam aspek komunikasi publik yang diaplikasikan aparat Pemerintah Desa Mansamat B terkait penyusunan RKPDes di antaranya diwujudkan dengan jalan: 1). Publikasi informasi melalui bauran kanal media daring dan luring secara berkeseimbangan, 2). Kesesuaian detail informasi sesuai ketentuan pedoman yang berlaku (UU Desa), 3). Pencantuman *timeline* jadwal alokasi waktu penyusunan, dan 4). Keterjangkauan akses informasi bagi semua lapisan masyarakat.

Saran

Berdasar berbagai pemaparan atas hasil penelitian dan pembahasan di atas, kiranya peneliti hendak menyampaikan beberapa saran bagi masing-masing pihak berkepentingan guna dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengambilan putusan ataupun kebijakan terkait

etika komunikasi publik terkhusus untuk kebutuhan perbaikan program Musrembang RKPDes di Desa Mansamat B agar berjalan lebih baik lagi ke depan. Berbagai saran tersebut antara lain:

1. Bagi aparat pemerintah desa (Pemdes) Mansamat B
 - a. Pemdes diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat desa secara lebih luas lagi sehingga semua aspirasi masyarakat dapat tertampung sepenuhnya menurut prinsip berkeadilan,
 - b. Pemdes perlu lebih gencar lagi melakukan sosialisasi secara reguler mengenai kegiatan Musrembang RKPDes yang berjalan di Desa Mansamat B di berbagai acara publik yang dihelat seperti posyandu, rapat RT/RW, karang taruna, dan lainnya agar mampu meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan program pembangunan desanya,
 - c. Pemdes perlu menghidupkan portal informasi digital *online* agar dapat diakses secara *real time* oleh seluruh lapisan masyarakat.
 - d. Pemerintah desa seharusnya memberikan fasilitas online di masa pandemi ini sehingga aspirasi dan keluhan masyarakat langsung dapat di respon pemerintah secara cepat dan tepat

sehingga masyarakat dan pemerintah desa mansamat B mampu membangun sinergi dalam hal ide rencana kerja pemerintah desa.

2. Bagi partisipan Musrembang RKPDes Mansamat B

a. Para partisipan hendaknya dipilih berdasarkan porsi *background* profesi yang beragam dan berimbang serta telah berpengalaman lebih sehingga nantinya mereka akan tahu secara presisi akan tingkat kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, sekaligus dapat berperan ganda sebagai pengawas secara langsung di lapangan saat pelaksanaan program berlangsung,

b. Partisipan diharapkan lebih memprioritaskan arah pembangunan desa yang lebih berorientasi pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat, menaikkan taraf hidup penduduk marginal, serta lebih visioner dalam menangkap berbagai tingkat perubahan zaman sebagai upaya antisipasi bentuk perubahan yang terjadi seperti pengembangan aspek digital dalam mendukung kompetensi masyarakat desa ke depan ataupun sebagai komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat.

3. Bagi masyarakat Desa Mansamat B

a. Masyarakat hendaknya jangan hanya bersikap pasif namun lebih berperan aktif dalam menyalurkan aspirasinya pada

Musrembang RKPDes Desa Mansamat B, mengingat pembangunan sendiri pada hakekatnya adalah untuk kepentingan masyarakat dalam rangka menunjang kemajuan pembangunan desa ke depan,

b. Terus memupuk kesadaran dan kepedulian diri yang tinggi untuk ikut serta dan terlibat secara langsung dalam kegiatan Musrembang RKPDes.

Daftar Pustaka

BUKU

Dewi, S. K., & Budaya, F. I. P. ,(2010).

Wewenang Negara dalam Bidang Moral.

Dwiyanto, A. (2005). BAB 6 TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*, 229.

Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 141-151.

ISMAIL NURDIN, M. S. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.

Keban, F., & Erol, M. (2011). Effects of Strategy Instruction in Cooperative Learning Groups Concerning Undergraduate Physics Labworks. *Latin-American Journal of Physics Education*, 5(1).

Lestary, D. (2020). *Penerapan Etika Pemerintahan Pada Pelayanan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kota*

- Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- ¹Maryani, N. I. (2014). Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dppkd) Kabupaten Bintan). *Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 1-29.
- Osborne, D. (1993). *Reinventing government*.
- Osborne, D. E., & Plastrik, P. (2000). *The reinventor's fieldbook: Tools for transforming your government* (p. 42). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Santoso, T., & Dewi, M. P. (2019). Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 179-187.
- Subarsono, A. G. (2005). BAB 4 PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN, RESPONSIF, DAN NON-PARTISAN. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*, 140.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widodo, J. (2001). *Good governance: telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. surabaya: Insan Cendekia.
- Wisok, Y. P. (2009). Etika mengalami krisis, membangun pendirian.
- Sugiyono, F. X. (2017). *Neraca pembayaran: Konsep, Metodologi dan penerapan* (Vol. 4). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.